

PERAN PARIWISATA BAHARI DAN PERTUMBUHAN EKONOMI BERKELANJUTAN DI PULAU GELASA, KABUPATEN BANGKA TENGAH

Anugrah Gusta Prima*, Zakia Ayu Lestari, Kunkun Kurniawan & Iga Safa Marwani

<http://doi.org/10.5614/wpar.2025.23.2.08>

Diserahkan : 3 November 2025

Diterima: 23 Desember 2025

Diterbitkan: 31 Desember 2025

*Penulis korespondensi, e-mail:
zakia.ayu@unmuhabbel.ac.id

Penelitian ini menganalisis peran pariwisata bahari dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di Pulau Gelasa, Kabupaten Bangka Tengah dengan fokus pada dimensi ekonomi lokal berbasis masyarakat. Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dalam penelitian ini dipahami sebagai peningkatan pendapatan masyarakat pesisir, penciptaan lapangan kerja, serta munculnya efek pengganda ekonomi melalui berkembangnya usaha kecil dan menengah pendukung pariwisata yang dijalankan tanpa mengorbankan kelestarian ekosistem pesisir. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif analitis. Data dikumpulkan melalui observasi lapangan, wawancara dengan kelompok sadar wisata dan masyarakat lokal serta analisis data ekonomi lokal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pariwisata bahari berkontribusi signifikan terhadap peningkatan pendapatan masyarakat, penyerapan tenaga kerja, dan penguatan ekonomi lokal, sekaligus mendorong kesadaran kolektif akan pentingnya pelestarian lingkungan. Temuan ini menginformasikan bahwa pengelolaan pariwisata bahari berbasis keberlanjutan dan partisipasi masyarakat merupakan prasyarat utama agar manfaat ekonomi dapat dinikmati secara berkelanjutan di Pulau Gelasa.

Kata Kunci: Pariwisata Bahari, Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan, Pulau Gelasa.

Indonesia merupakan negara Kepulauan yang memiliki banyak potensi bahari. Lebih dari 70% wilayahnya adalah lautan. Ribuan pulau tersebar di berbagai provinsi dengan keanekaragaman hayati yang luar biasa, sumber daya alam laut, dan ekosistem pesisir yang indah. Pariwisata bahari sangat penting untuk pembangunan berkelanjutan karena, jika dikelola dengan benar, dapat mendorong ekonomi lokal dan melindungi lingkungan (Dewi & Yuliana, 2020). Paradigma pembangunan pariwisata Indonesia telah berubah dari eksplorasi potensi alam ke arah ekowisata bahari yang menekankan keseimbangan antara ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Pulau Gelasa yang terletak di Desa Batu Beriga, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, memiliki potensi pariwisata bahari yang sangat menjanjikan. Pulau ini memiliki keindahan terumbu karang, pantai berpasir putih, serta perairan yang masih relatif terjaga dari aktivitas industri besar seperti pertambangan timah di laut.

Pulau Gelasa, seperti banyak wilayah pesisir lain di Indonesia, menghadapi dilema klasik antara pertumbuhan ekonomi melalui pariwisata dan pelestarian ekosistem pesisir. Meningkatnya kunjungan wisatawan lokal dan upaya pemerintah daerah untuk mempromosikan wisata bahari

dalam beberapa tahun terakhir munculnya tekanan terhadap lingkungan laut, seperti kerusakan habitat karang (Putra & Santosa, 2022).

Kondisi ini menunjukkan betapa pentingnya melakukan analisis menyeluruh tentang bagaimana pariwisata bahari dapat membantu pertumbuhan ekonomi berkelanjutan tanpa mengorbankan daya dukung lingkungan. Peningkatan pendapatan masyarakat adalah bagian dari pembangunan ekonomi berkelanjutan (Rahmawati et al., 2021). Hal ini berarti menjaga sumber daya alam tetap produktif untuk generasi berikutnya. Akibatnya, wilayah pesisir seperti Pulau Gelasa membutuhkan metode pembangunan pariwisata yang menekankan keseimbangan lingkungan dan ekonomi.

Secara nasional kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB Indonesia sebelum pandemi COVID-19 menunjukkan tren positif, mencapai 5,2 persen pada tahun 2019 (BPS, 2020). Wisata alam dan bahari dianggap lebih aman dan sehat daripada wisata perkotaan, sehingga sektor ini mulai pulih setelah pandemi (UNWTO, 2022). Oleh karena itu, pariwisata bahari Pulau Gelasa memiliki potensi besar untuk membantu pemulihan ekonomi wilayah tersebut. Namun, pengembangan tersebut sangat bergantung pada pengelolaan



Gambar 1. Peta Sebaran Daya Tarik Wisata di KPPK 7

Sumber: Ripparkab 2018-2025, 2025.

berkelanjutan, dukungan kebijakan dari pemerintah daerah, dan partisipasi masyarakat lokal.

Dari perspektif ekonomi di Desa Batu Beriga yang merupakan wilayah dari Pulau Gelasa, dari sisi pariwisata bahari dapat memberikan efek ganda (*multiplier effect*) bagi masyarakat pesisir, antara lain peningkatan lapangan kerja, tumbuhnya usaha kecil dan menengah (UMKM), serta peningkatan pendapatan daerah. Akan tetapi, jika tidak diiringi dengan perencanaan tata ruang dan pengelolaan lingkungan yang baik, kegiatan wisata bahari berisiko menimbulkan kerusakan ekosistem laut yang justru dapat menurunkan daya tarik wisata itu sendiri (Damanik, 2019). Dalam konteks inilah, keseimbangan antara ekonomi dan ekologi menjadi isu sentral dalam pengembangan pariwisata bahari di Pulau Gelasa dari sektor ekologi dan ekonomi dari sisi Desa Batu Beriga.

Desa Batu Beriga juga menghadapi masalah infrastruktur dan sumber daya manusia yang terbatas. Dengan tingkat pendidikan yang rendah, akses modal yang terbatas, dan

keterbatasan dalam pelatihan pariwisata, sebagian besar masyarakat lokal masih hidup sebagai nelayan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Nugroho (2021) di daerah serupa, pertumbuhan pariwisata bahari bergantung pada dua faktor: potensi alam dan kemampuan masyarakat pesisir untuk beradaptasi dengan perubahan ekonomi. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat menjadi komponen penting dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Menurut Butler (2019), konsep pembangunan pariwisata berkelanjutan (*sustainable tourism development*) mencakup tiga dimensi utama: ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dalam konteks bahari, keseimbangan antara ketiganya sangat krusial karena aktivitas wisata di laut dan pesisir memiliki dampak langsung terhadap ekosistem yang rentan. UNWTO (2022) menekankan bahwa destinasi bahari memerlukan pengelolaan berbasis daya dukung (*carrying capacity*) agar tidak mengalami degradasi lingkungan.



Gambar 2. Pulau Gelasa

Sumber: Pokdarwis Tanjung Kamek, 2023.

Dari perspektif ekonomi, Putra & Santosa (2022) dalam *Tourism and Sustainability Review* menyoroti bahwa pariwisata bahari menciptakan efek ekonomi berantai, mulai dari sektor transportasi laut, kuliner, penginapan, hingga jasa penyewaan perahu. Namun, mereka juga mengingatkan bahwa tanpa regulasi lingkungan yang tegas, efek tersebut bisa menimbulkan *overcapacity tourism* dimana kondisi ketika jumlah wisatawan melebihi kemampuan alam untuk menampungnya. Dalam konteks Pulau Gelasa, risiko seperti ini dapat muncul jika peningkatan wisata tidak diimbangi dengan sistem pengelolaan limbah dan kontrol aktivitas di kawasan konservasi.

Secara global, laporan UNEP (2022) menunjukkan bahwa lebih dari 50 persen destinasi bahari dunia menghadapi tantangan polusi laut dan degradasi terumbu karang akibat aktivitas wisata. Namun, daerah yang menerapkan kebijakan ekowisata seperti di Palau dan Maladewa berhasil menurunkan tingkat kerusakan ekosistem hingga 30 persen dengan tetap mempertahankan pertumbuhan ekonomi pariwisata. Pelajaran dari praktik global ini penting bagi Pulau Gelasa, yang memiliki karakteristik ekologi serupa.

Dari segi kebijakan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (2023) menegaskan bahwa arah pembangunan pariwisata Indonesia pasca-pandemi adalah menuju “*green tourism*” dan “*blue economy*” dimana dua konsep yang menekankan keterpaduan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian sumber daya alam laut. Kebijakan seperti ini menempatkan daerah seperti Pulau Gelasa sebagai laboratorium penting untuk menguji efektivitas penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan pada skala lokal.

Secara teoretis, hubungan antara pariwisata bahari dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dapat dijelaskan melalui teori *triple bottom line* (Elkington, 2019), yang menilai keberhasilan pembangunan berdasarkan tiga aspek: *profit* (keuntungan ekonomi), *people* (manfaat sosial), dan *planet* (kelestarian lingkungan). Dalam konteks Pulau Gelasa, penerapan prinsip ini berarti pariwisata tidak hanya diukur dari jumlah wisatawan atau pendapatan, tetapi juga dari sejauh mana kegiatan wisata mendukung kesejahteraan masyarakat lokal di sekitar wilayahnya (desa Batu Beriga) dan menjaga kualitas lingkungan laut.

Pengembangan wisata bahari di Pulau Gelasa berpotensi meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar wilayah (desa Batu Beriga) melalui sektor jasa wisata, kuliner laut, dan penginapan. Namun agar manfaat ekonomi tersebut berkelanjutan, perlu adanya sistem pengelolaan berbasis masyarakat dan regulasi lingkungan yang jelas. Model seperti ini berhasil di daerah lain seperti Pulau Derawan dan Raja Ampat, dimana partisipasi komunitas lokal menjadi pilar utama keberhasilan ekonomi dan konservasi (Hidayat et al., 2021).

Penerapan teknologi ramah lingkungan dalam pengelolaan wisata, seperti sistem energi surya, pengolahan limbah cair, dan pembatasan jumlah wisatawan, dapat menjadi solusi yang efektif. Pemerintah daerah dan pelaku usaha perlu bekerja sama dalam menciptakan kebijakan yang tidak hanya menarik investor, tetapi juga memastikan kelestarian lingkungan laut.

Dari sisi kebijakan oleh pemerintah Kabupaten Bangka Tengah, Pulau Gelasa telah dimasukkan ke dalam rencana pengembangan destinasi wisata bahari di bagian KPPK-7. Namun, penelitian ilmiah tentang hubungan antara pertumbuhan pariwisata bahari dan ekonomi berkelanjutan masih sangat sedikit. Dengan fokus pada keseimbangan manfaat ekonomi dan pelestarian lingkungan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dan empiris untuk strategi pengelolaan pariwisata bahari yang berbasis keberlanjutan.

Wisata bahari di Pulau Gelasa memiliki potensi besar untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal dan meningkatkan kesadaran lingkungan masyarakat pesisir. Namun, kajian-kajian pariwisata bahari yang telah ada umumnya masih berfokus pada identifikasi potensi destinasi, peningkatan jumlah kunjungan wisatawan atau kontribusi ekonomi secara agregat, tanpa mengulas secara lebih mendalam bagaimana manfaat ekonomi tersebut dirasakan pada tingkat masyarakat pesisir dan bagaimana keterkaitannya dengan upaya pelestarian ekosistem laut. Selain itu, penelitian empiris yang secara khusus mengkaji hubungan antara pariwisata bahari, dinamika ekonomi lokal berbasis masyarakat, dan prinsip keberlanjutan pada skala

pulau kecil masih relatif terbatas, khususnya di wilayah Kepulauan Bangka Belitung. Berangkat dari celah tersebut, artikel ini memberikan kontribusi dengan menganalisis secara kontekstual peran pariwisata bahari dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di Pulau Gelasa melalui pengukuran peningkatan pendapatan masyarakat, penciptaan lapangan kerja, serta munculnya efek pengganda ekonomi lokal, yang dikaitkan dengan praktik pengelolaan dan konservasi ekosistem pesisir. Oleh karena itu, penting untuk melakukan analisis ilmiah tentang peran pariwisata bahari dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di Pulau Gelasa, bukan hanya untuk memahami dinamisme yang ada.

Profil Pulau Gelasa

Pulau Gelasa yang terletak di Kabupaten Bangka Tengah memiliki karakteristik geografis yang sangat mendukung pengembangan pariwisata bahari berkelanjutan. Berdasarkan hasil observasi lapangan, pulau ini memiliki garis pantai sepanjang kurang lebih 12 kilometer dengan kondisi perairan yang relatif jernih dan terumbu karang yang masih terjaga kualitasnya. Ekosistem pesisir Pulau Gelasa mencakup hutan mangrove seluas sekitar 45 hektar, padang lamun yang menjadi habitat berbagai biota laut, serta banyak bebatuan granit khas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang menjadi daya tarik.

Karakteristik wisatawan yang berkunjung ke Pulau Gelasa didominasi oleh wisatawan domestik dari Pulau Bangka sendiri dan Sumatera Selatan dengan rentang usia 25-45 tahun. Aktivitas wisata yang paling diminati meliputi snorkeling, diving, fotografi bawah air, serta wisata kuliner seafood yang disajikan langsung oleh masyarakat lokal. Hasil wawancara dengan pokdarwis Tanjung Karnekk mengungkapkan bahwa durasi kunjungan rata-rata wisatawan adalah satu hingga dua hari, dengan pengeluaran rata-rata berkisar Rp 500.000 per orang untuk paket wisata lengkap termasuk konsumsi, dan aktivitas wisata.

Kontribusi Pariwisata Bahari terhadap Perekonomian Lokal

Analisis data ekonomi lokal menunjukkan bahwa sektor pariwisata bahari telah memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan pendapatan masyarakat di Desa Batu Beriga. Berdasarkan wawancara mendalam dengan 25 kepala keluarga yang terlibat langsung dalam sektor pariwisata, ditemukan bahwa pendapatan rata-rata mereka meningkat sebesar 65 persen sejak mulai aktif dalam kegiatan wisata bahari. Sebelum terlibat dalam pariwisata, pendapatan rata-rata masyarakat pesisir berkisar Rp 2.500.000 per bulan yang berasal dari aktivitas penangkapan ikan tradisional. Setelah diversifikasi ekonomi melalui sektor wisata, pendapatan meningkat menjadi Rp 3.125.000 per bulan.

Efek pengganda ekonomi (*multiplier effect*) dari pariwisata bahari di Pulau Gelasa dapat diidentifikasi melalui

munculnya berbagai usaha kecil dan menengah yang melayani kebutuhan wisatawan. Penciptaan lapangan kerja merupakan dampak ekonomi yang paling terasa dari perkembangan pariwisata bahari. Hasil survei menunjukkan bahwa sektor wisata telah menyerap sekitar 50 tenaga kerja langsung dan 77 tenaga kerja tidak langsung. Tenaga kerja langsung mencakup pemandu wisata, operator perahu, pengelola homestay, dan penjual makanan, sedangkan tenaga kerja tidak langsung meliputi pemasok bahan baku kuliner, pengrajin souvenir, dan penyedia jasa pemeliharaan sarana wisata. Dari sisi gender, keterlibatan perempuan dalam sektor pariwisata cukup signifikan, mencapai 65 persen dari total tenaga kerja, terutama dalam pengelolaan homestay, kuliner, dan kerajinan tangan.

Strategi Pengembangan Pariwisata Bahari Berkelanjutan

Berdasarkan analisis terhadap potensi, kontribusi ekonomi, praktik konservasi, serta tantangan yang dihadapi, dapat dirumuskan beberapa strategi kunci untuk pengembangan pariwisata bahari berkelanjutan di Pulau Gelasa. Pertama, penguatan infrastruktur dasar melalui investasi pemerintah dan kemitraan publik-swasta. Prioritas infrastruktur meliputi pembangunan dermaga yang memadai dengan standar keselamatan tinggi, pengembangan sistem energi terbarukan berbasis surya dan angin, serta pembangunan sistem penyediaan air bersih yang *sustainable*. Investasi infrastruktur ini harus dirancang dengan prinsip ramah lingkungan dan terintegrasi dengan konsep ekowisata.

Kedua, pengembangan kapasitas masyarakat melalui program pelatihan dan pendampingan yang berkelanjutan di Desa Batu Beriga. Program ini perlu mencakup aspek teknis pelayanan wisata, manajemen usaha, pemasaran digital, serta edukasi lingkungan. Kerjasama dengan perguruan tinggi dan lembaga pelatihan profesional perlu diperkuat untuk memastikan kualitas dan keberlanjutan program. Selain itu, pengembangan sistem sertifikasi kompetensi untuk pelaku usaha wisata dapat menjadi insentif bagi peningkatan kualitas layanan.

Ketiga, penguatan kelembagaan melalui transformasi Pokdarwis menjadi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang berbadan hukum. Status kelembagaan yang kuat akan memudahkan akses pembiayaan, kemitraan strategis, dan akuntabilitas pengelolaan. BUMDes dapat mengelola aset wisata secara profesional dengan tetap memastikan distribusi manfaat ekonomi yang adil kepada masyarakat. Mekanisme bagi hasil yang transparan dan partisipatif perlu ditetapkan untuk menjaga kohesi sosial dan keberlanjutan dukungan masyarakat.

Keempat, penetapan kawasan konservasi laut dan pengembangan regulasi yang komprehensif. Penetapan status kawasan konservasi akan memberikan perlindungan hukum yang kuat terhadap ekosistem laut dari ancaman

aktivitas destruktif seperti pertambangan dan penangkapan ikan ilegal. Regulasi daerah tentang pengelolaan pariwisata bahari berkelanjutan perlu segera disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, mencakup aspek zonasi, *carrying capacity*, standar operasional, mekanisme *monitoring*, dan sanksi bagi pelanggaran.

Kelima, pengembangan sistem *monitoring* dan evaluasi berbasis data untuk memastikan keberlanjutan. Sistem ini perlu mencakup indikator ekonomi (pendapatan, penyerapan tenaga kerja, kontribusi PAD), indikator sosial (partisipasi masyarakat, distribusi manfaat, konflik), dan indikator lingkungan (kualitas air, tutupan terumbu karang, populasi ikan). Data yang dikumpulkan secara berkala dapat menjadi dasar pengambilan keputusan dan penyesuaian strategi pengembangan.

Implikasi terhadap Kebijakan Pembangunan Daerah

Penelitian ini memiliki implikasi penting terhadap kebijakan pembangunan daerah, khususnya dalam konteks penentuan prioritas investasi infrastruktur dan arah pengembangan ekonomi. Pemerintah daerah perlu menempatkan sektor pariwisata bahari sebagai sektor strategis dalam rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjang, dengan alokasi anggaran yang memadai untuk pengembangan infrastruktur pendukung dan program pemberdayaan masyarakat.

Terkait isu pembangunan PLTN, temuan menunjukkan perlunya kajian komprehensif yang tidak hanya mempertimbangkan aspek teknis keamanan dan kebutuhan energi, tetapi juga dampak sosial-ekonomi terhadap sektor pariwisata dan persepsi masyarakat. Informasi dari berbagai sumber yang inklusif dan transparansi menjadi kunci dalam pengambilan keputusan yang dapat diterima oleh semua pemangku kepentingan. Pemerintah perlu mempertimbangkan secara serius usulan masyarakat tentang alternatif energi terbarukan yang lebih sejalan dengan karakter destinasi wisata bahari.

Penolakan masyarakat terhadap pertambangan laut mencerminkan pergeseran paradigma pembangunan dari eksploratif menuju berkelanjutan. Pemerintah daerah perlu mendukung aspirasi ini dengan kebijakan yang tegas melindungi kawasan-kawasan yang memiliki nilai ekologis dan ekonomi tinggi dari aktivitas pariwisata dan perikanan. Moratorium pertambangan perlu ditingkatkan menjadi penetapan kawasan konservasi permanen yang didukung oleh regulasi yang kuat dan mekanisme penegakan hukum yang efektif.

Model Pengembangan Pariwisata Bahari Berbasis Masyarakat

Berdasarkan analisis komprehensif terhadap kondisi eksisting, potensi, dan tantangan, model pengembangan pariwisata bahari yang paling sesuai untuk Pulau Gelasa adalah *Community-Based Marine Tourism* (CBMT) dengan

penguatan governansi kolaboratif. Model ini menempatkan masyarakat lokal sebagai aktor utama dalam pengelolaan, pengambilan keputusan, dan penerima manfaat utama dari aktivitas pariwisata (Suansri, 2020).

Prinsip-prinsip utama model CBMT yang perlu diterapkan meliputi: (1) partisipasi aktif masyarakat dalam seluruh tahapan mulai dari perencanaan hingga evaluasi; (2) distribusi manfaat ekonomi yang adil dan merata; (3) konservasi ekosistem sebagai prioritas utama; (4) penguatan kapasitas lokal melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan; dan (5) pelestarian nilai-nilai budaya dan kearifan lokal. Implementasi prinsip-prinsip ini memerlukan komitmen kuat dari pemerintah daerah, dukungan akademisi, dan kemitraan dengan sektor privat yang memiliki visi sejalan.

Struktur kelembagaan yang diusulkan adalah transformasi Pokdarwis menjadi BUMDes Wisata yang dikelola secara profesional dengan mekanisme *check and balance* yang jelas. BUMDes dapat mengelola aset wisata seperti dermaga, area camping, dan fasilitas umum lainnya dengan sistem bagi hasil yang transparan. Sebagian keuntungan dialokasikan untuk dana konservasi, pengembangan kapasitas SDM dan dana kesejahteraan masyarakat. Model ini telah berhasil diterapkan di beberapa desa wisata di Indonesia seperti Desa Wisata Nglanggeran dan Desa Wisata Pentingsari (Nugroho & Pramukanto, 2021).

Kemitraan strategis dengan sektor *private* perlu dikelola secara hati-hati untuk memastikan tidak terjadi privatisasi aset dan marginalisasi masyarakat lokal. Skema kemitraan yang disarankan adalah *joint venture* dengan komposisi kepemilikan mayoritas tetap pada masyarakat melalui BUMDes, sementara pihak swasta berperan sebagai investor dan penyedia expertise dalam manajemen *hospitality* dan *marketing*. Perjanjian kemitraan harus mencakup klausul tentang perlindungan lingkungan, pemberdayaan masyarakat lokal, dan mekanisme *exit strategy* jika terjadi pelanggaran

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa pariwisata bahari memiliki peran sangat signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di Pulau Gelasa dan Desa Batu Beriga. Kontribusi ekonomi berupa peningkatan pendapatan masyarakat sebesar 65 persen, penciptaan 127 lapangan kerja langsung dan tidak langsung, serta peningkatan PAD dari sektor wisata membuktikan potensi besar sektor ini. Praktik konservasi berbasis masyarakat yang telah berjalan menunjukkan bahwa pariwisata dan pelestarian lingkungan dapat berjalan beriringan dengan pengelolaan yang tepat.

Namun demikian, keberlanjutan pengembangan pariwisata bahari menghadapi tantangan serius dari isu eksternal berupa rencana pembangunan PLTN dan ancaman pertambangan laut. Kedua isu ini memerlukan penanganan kebijakan yang bijaksana dengan mempertimbangkan aspirasi masyarakat lokal dan kepentingan jangka panjang keberlanjutan destinasi wisata. Penolakan masyarakat terhadap pertambangan laut

mencerminkan kesadaran kolektif bahwa pariwisata bahari berkelanjutan memberikan manfaat ekonomi yang lebih adil dan berkesinambungan dibandingkan eksplorasi sumber daya yang destruktif.

Rekomendasi kebijakan yang diusulkan meliputi: (1) penetapan Pulau Gelasa sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) dengan status konservasi laut yang kuat; (2) evaluasi komprehensif terhadap rencana pembangunan PLTN dengan mempertimbangkan dampak terhadap pariwisata dan eksplorasi alternatif energi terbarukan yang lebih sejalan dengan karakter destinasi; (3) penguatan moratorium pertambangan laut menjadi larangan

permanen melalui Peraturan Daerah; (4) alokasi anggaran khusus untuk pengembangan infrastruktur pariwisata berkelanjutan; (5) pembentukan BUMDes Wisata dengan struktur governansi yang kuat; (6) program pengembangan kapasitas SDM yang berkelanjutan; dan (7) sistem monitoring dan evaluasi berbasis data untuk memastikan keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Penelitian lanjut diperlukan untuk menganalisis dampak jangka panjang dari implementasi model CBMT dan efektivitas kebijakan konservasi terhadap resiliensi ekosistem dan kesejahteraan masyarakat lokal.

Daftar Pustaka

- Ahmadia, G. N., Cheng, S. H., Andradi-Brown, D. A., Baum, T., Cox, C. E., Estradivari, E., ... & Gill, D. (2022). Marine protected areas and the wealth of nations. *Nature Sustainability*, 5(4), 346-354.
- Bennett, N. J., Cisneros-Montemayor, A. M., Blythe, J., Silver, J. J., Singh, G., Andrews, N., ... & Sumaila, U. R. (2021). Towards a sustainable and equitable blue economy. *Nature Sustainability*, 4(11), 991-1003.
- BPS. (2020). *Statistik Indonesia 2020*. Badan Pusat Statistik.
- Butler, R. W. (2019). Sustainable tourism in sensitive environments: A wolf in sheep's clothing? *Sustainability*, 11(13), 3722.
- Chen, Y., & Liu, F. (2023). Millennial and Gen Z tourists' sustainable behavior in marine tourism: The role of destination image and environmental awareness. *Journal of Sustainable Tourism*, 31(7), 1628-1647.
- Damanik, J. (2019). Pariwisata berkelanjutan dalam pusaran krisis global. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 23(1), 77-94.
- Dewi, I. N., & Yuliana, M. (2020). Pengembangan pariwisata bahari berkelanjutan di Indonesia: Tantangan dan peluang. *Jurnal Kebijakan Pembangunan*, 15(2), 167-182.
- Elkington, J. (2019). 25 years ago I coined the phrase "triple bottom line." Here's why it's time to rethink it. *Harvard Business Review*, 25.
- Hidayat, R., Suprihardjo, R., & Bambang, A. N. (2021). Community-based marine tourism development model in small islands: Case study of Derawan Islands, East Kalimantan. *Ocean and Coastal Management*, 209, 105662.
- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. (2023). *Rencana Strategis Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2023-2025*. Jakarta: Kemenparekraf.
- Kurniawan, F., & Aziz, A. A. (2020). Marine ecotourism as an economic incentive for coral reef conservation in Indonesia. *Marine Policy*, 120, 104145.
- Nugroho, I. (2021). *Ekonisata dan Pembangunan Berkelanjutan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nugroho, P., & Pramukanto, F. H. (2021). Community-based tourism village development strategy: A case study of tourism villages in Yogyakarta. *Journal of Indonesian Tourism and Development Studies*, 9(2), 101-112.
- Prasetyo, A., & Hidayat, W. (2023). Digital transformation in marine tourism: Opportunities and challenges in Indonesian small islands. *Tourism and Hospitality Management*, 29(1), 123-138.
- Putra, I. N. D., & Santosa, H. (2022). Carrying capacity analysis for sustainable marine tourism development: A systematic review. *Tourism and Sustainability Review*, 3(1), 45-62.
- Rahmawati, D., Sukmara, A. P., & Dewi, R. S. (2021). Sustainable economic development through marine tourism in coastal communities: Evidence from Indonesia. *Journal of Coastal Development*, 24(2), 89-103.
- Suansri, P. (2020). *Community Based Tourism Handbook*. Bangkok: Responsible Ecological Social Tour Project.
- UNEP. (2021). *Blue Economy: Sharing Success Stories to Inspire Change*. United Nations Environment Programme.
- UNEP. (2022). *Global Marine Assessment Report*. United Nations Environment Programme.
- UNWTO. (2022). *Tourism and COVID-19: Recovery and Resilience*. United Nations World Tourism Organization.
- Wahyudi, A. J., Sartohadi, J., Suratman, S., & Purwanto, T. H. (2022). Application of GIS and remote sensing for coral reef monitoring in marine protected areas. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 1039(1), 012042.



Anugrah Gusta Prima merupakan seorang *Tourism Analyst*. Saya berperan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program strategis pariwisata yang berorientasi pada peningkatan daya saing destinasi dan kesejahteraan masyarakat lokal pariwisata di Prov. Kepulauan Bangka Belitung. Dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman yang kuat di bidang pariwisata, saya berkomitmen untuk mendorong inovasi, promosi berkelanjutan, serta sinergi antar pemangku kepentingan guna mewujudkan Prov. Kepulauan Bangka Belitung sebagai destinasi wisata unggulan yang berkelanjutan dan berdaya saing di tingkat nasional maupun internasional.



Zakia Ayu Lestari merupakan seorang dosen pariwisata di Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung. Dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman yang kuat dibidang pariwisata. Aktivitas akademiknya berfokus pada pengembangan keilmuan pariwisata yang kontekstual dengan karakteristik daerah kepulauan, khususnya Bangka Belitung, dengan penekanan pada pariwisata berkelanjutan, pengelolaan destinasi, serta integrasi budaya lokal dalam pengembangan wisata..



Iga Safa Marwani merupakan seorang dosen pariwisata di Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung. Ia lebih fokus pada bidang keilmuan manajemen perhotelan, dengan fokus akademik pada pengelolaan operasional hotel, kualitas layanan, serta pengembangan sumber daya manusia perhotelan. Penelitian yang mengkaji praktik manajemen perhotelan secara aplikatif, termasuk strategi peningkatan kepuasan tamu, efisiensi operasional, serta integrasi nilai budaya lokal dalam layanan perhotelan.



Kunkun Kurniawan merupakan seorang dosen pariwisata di STP ARS Internasional. Berwisata sambil membuat catatan perjalanan dan menggambar sketsa menjadi bagian yang paling disenangi. Terlibat aktif di dunia industri kreatif. Membangun jejaring di berbagai komunitas kreatif. Di beberapa tempat melakukan pendampingan untuk para pelaku UMKM yang terhubung dengan pariwisata. Aktif melakukan penelitian terkait wisata desa yang berbasis masyarakat serta pengembangan destinasi pariwisata berkelanjutan.